

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Gilang Permadi, 2007, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu, nasibmu kini!*, Bogor: Yudhistira.
- Grafika Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- Hadi, Samsul dkk. 2011, *Metode Riset Evaluasi*, , Yogyakarta: Laksbang.
- Muhammad, 2008, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustari, Nuryanti, 2015, *Pemahaman Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Nasution, 2016, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suharizal, Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta : Tafa Media.
- Rianto Adi, 2013, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Handoko Tanuwijaya, 2011, *Bisnis Pedagang Kaki Lima*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

B. JURNAL

- Adi Prakoso, H. M., Aries Djaenuri, Ika Sartika, 2022, "Evaluasi Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Jakarta." *Jurnal Adhikari*.
- Aenida Fatma Pitaloka, A., Heru Nuswanto, Amri Panahatan Sihotang, 2021, "Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang." *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 2, No.2.
- Dea Ananda, Irawati, Andri Rusta, Fajri M., 2023, "Implementasi Peraturan Daerah Bukittinggi No. 8 Tahun 2014 Terkait Kebijakan Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi.” *Madika: Jurnal Politik dan Governance*, Vol. 3, No. 1.

Sri Nur Hari Susanto, Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3 Issue 3, September 2020, hlm. 434.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penjelasan Umum Penataan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara, Persyaratan, Dan Kriteria Pendaftaran Pedagang Kaki Lima.

Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-01-2007 tentang Penetapan Kawasan Seputaran Jam Gadang sebagai Percontohan Pelaksanaan Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) secara Intensif di Kota Bukittinggi.

D. INTERNET

<http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/>, diakses pada tanggal, 2 November 2023 pukul 13.05 WIB.

<http://bukittinggikota.bps.go.id> di akses pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 11.20 WIB.